

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2011-2013**

***THE INFLUENCE OF TAX REGIONAL INCOME ON THE CAPITAL
EXPENDITURE AT THE CITY IN WEST JAVA IN 2011-2013***

Suci Adriyana Putri Lestari Universitas
Telkom
suciadriyanaputtrilestari@yahoo.com.com

Handiyaningrum Tjatur R, SE., M.Si
Universitas Telkom
handiyaningrum@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar, penerimaan dari pajak ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor di daerah sehingga penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal daerah.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausal. Penelitian ini mencakup 9 kota di Jawa Barat dengan menggunakan teknik sampel jenuh dan didapatkan sampel sebanyak 27. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah pada pemerintahan daerah kota di Jawa Barat tahun 2011-2013.

Kata kunci : penerimaan pajak daerah, belanja modal daerah

ABSTRACT

The most a part of the local own revenue is regional tax. Tax income used to finance governance and regional development. Improvement of regional economic growth to attract investors and regional tax income will increase which will be used the the government to provide public service that will increase capital expenditure.

This research is classified into a descriptive study causal verification. The research was conducted at 9 city in the West Java with sample selection using non probability sampling obtained a sample of 27 sample.

The result of the analysis is tax regional income have a positif significant impact on the capital expenditure at the city in West Java in 2011-2013.

Keyword: tax regional income, capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Pajak daerah tersebut adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak parkir, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c.

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk yang dapat dipaksakan berdasar perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Dini dan Novita (2012) memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Agave Sianturi (2010), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal daerah baik sebelum maupun sesudah otonomi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak daerah

- b. Hasil Retribusi daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan terdiri dari:
- a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan pajak daerah dan dasar hukum pajak daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Belanja Daerah

menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

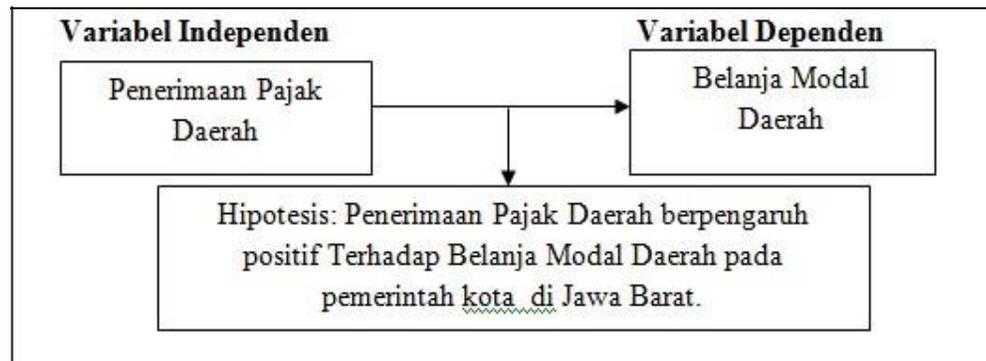
Belanja Modal

Menurut Pemandagri Nomor 13 tahun 2006 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah

Berdasarkan dari Definisi pajak bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belanja pemerintah daerah yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat adalah belanja modal. Maka saat penerimaan pajak besar sudah semestinya jika belanja modal pun besar agar di peroleh kemakmuran rakyat. Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian menurut Agave Sianturi (2010) yaitu bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja modal. Demikian pula hasil penelitian Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah karena pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah terbesar.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas yang menguji pengaruh antara belanja modal daerah sebagai variabel dependen dengan penerimaan pajak daerah sebagai variabel independen.

Variabel Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah yang dapat diukur dengan : besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah.

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal daerah yang dapat diukur dengan : besarnya jumlah belanja modal yang direalisasikan setiap tahunnya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Sembilan kota di Jawa Barat dari tahun 2011-2013, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 27.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan bila anggota populasi relative kecil yaitu kurang dari 30.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier sederhana menggunakan program SPSS (*Statistical Package For The Social Science*) version 21.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan pajak daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat tahun 2011-2013

Penerimaan pajak daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat selama tahun 2011-2013 mengalami kenaikan diseluruh kota di Jawa Barat. Dilihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2011-2013, kota Bandung adalah kota yang penerimaan pajak daerahnya tertinggi. Dilihat dari kenaikan yang dialami pemerintah kota di Jawa Barat tahun 2011-2013 selama tiga tahun berturut-turut telah menunjukkan bahwa seluruh kota mengalami peningkatan penerimaan pajak hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah kota di Jawa Barat dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak daerah sudah baik. Dengan penerimaan pajak daerah yang semakin meningkat, pemerintah kota di Jawa Barat diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada tiap-tiap kota

2. Belanja modal daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat tahun 2011-2013

Belanja modal daerah pada pemerintahan daerah kota di Jawa Barat mengalami penurunan di beberapa daerah yaitu kota Banjar dan Cirebon pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena penyerapan APBD Jawa Barat tahun 2012 realisasi pendapatannya mencapai 78,9% sedangkan penyerapan belanja baru 54,3% yang sebagian besar bersumber dari pelaksanaan belanja pegawai yang realisasinya mencapai 61,7% dengan realisasi belanja modal daerah hanya 37,1% hal ini dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Jabar, 17 Desember 2012). Porsi belanja modal daerah pada umumnya lebih rendah dibanding belanja pegawai walaupun setiap tahun mengalami kenaikan realisasi belanja modal. Peningkatan belanja modal harus disesuaikan dengan potensi dan keadaan sumber daya alam masing-masing daerah.

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk variabel penerimaan pajak daerah 1,286 dengan probabilitas signifikansi 0,073 yaitu lebih dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah terdistribusi dengan normal begitu pula dengan variabel belanja modal daerah nilai Kolmogorov-Smirnov 1,274 dengan probabilitas signifikansi 0,078 hal ini menunjukkan variabel belanja modal daerah terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil menunjukkan Scatterplot pada penelitian ini memperlihatkan bahwa titik-titik penyebaran berada di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tersebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* (dw) adalah 2.628. sedangkan nilai *Durbin-Watson* tabel pada signifikan 5% dengan jumlah sampel 27 dan jumlah variabel independen 1 (k=1) maka tabel *Durbin-Watson* akan memberikan nilai $du = 1,469$ dan $dl = 1,316$. Oleh karena itu nilai dw lebih besar dari du dengan kriteria keputusan $4-du < dw < 4-dl$ yaitu $2,531 < 2,628 < 2,684$ maka keputusannya dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi.

PENGUJIAN SECARA PARSIAL

Kuncoro (2009:223) menyatakan Uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berikut adalah koefisien variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan uji *statistic t* :

Tabel 1
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	89958.930	22997.969		3.912	.001
1 Penerimaan Pajak Daerah	.880	.059	.948	14.874	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal Daerah
 Sumber : Data diolah (2015)

Variabel dependen pada model regresi ini adalah belanja modal daerah dan yang menjadi variabel independen adalah penerimaan pajak daerah. Model regresi berdasarkan hasil uji *statistic t* adalah :

$$\text{Belanja Modal Daerah} = 89.958,930 + 0,880 \text{ Penerimaan Pajak Daerah}$$

Koefisien regresi penerimaan pajak daerah (β) adalah sebesar 0,880 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah secara parsial.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pemerintah Daerah Kota Di Jawa Barat

Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal daerah pada pemerintah kota di Jawa Barat. Dari hasil analisis regresi yang dihasilkan menunjukkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 0 maka belanja modal daerah pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar Rp 89.958.930.000 dan setiap perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1.000.000.000 akan diikuti dengan perubahan pada belanja modal daerah sebesar Rp 880.000.000.

KESIMPULAN

1. Penerimaan pajak daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan diseluruh kota di Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kota yang penerimaan pajak dan peningkatan penerimaan pajak tertinggi, sedangkan kota Banjar merupakan kota yang terkecil penerimaan pajak dan peningkatan penerimaan pajaknya tahun 2012. Begitu pula Tasikmalaya peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2013 terkecil di Jawa Barat.
2. Belanja modal daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat tahun 2011-2013 mengalami kenaikan terbesar di kota bekasi dan terjadi penurunan di beberapa kota yaitu Banjar dan Cirebon yaitu sebesar Rp 2.794.417.632 dan Rp 46.085.906.323 tetapi mayoritas mengalami peningkatan belanja modal.
3. Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah pemerintahan kota di Jawa Barat adapun besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 89,8%.

SARAN

1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa akan tetapi bisa dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode penelitian..

2. Aspek Praktis

Pemerintahan kota di Jawa Barat lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah supaya pengalokasian belanja modal daerah lebih meningkat sehingga kemakmuran dan kepentingan masyarakat juga semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Agung Kresnandra dan Ni Made Adi Erawati. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 2013 ISSN: 2302-8556.
- Agave Sianturi. (2010). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Daerah di Kota/ Kabupaten Sumatra Utara*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Sumatra Utara 2010.
- Bastian, Indra. (2001). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanudin Makasar 26-27 Juli 2007.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. (2014). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Bandung : DPKAD.
- Dini Arwati dan Novita Hadiati. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2012 (Sematik 2012) Semarang 2012.
- Dwi Handayani dan Elva Nuraina. (2012). *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Volume 1 No. 1 Oktober 2012.
- Dodik Siswantoro. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. E-Jurnal Universitas Indonesia 2013.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim Abdullah. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2 Tahun XIII/25.
- Iin Indarti dan Sugiartiana. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian*

Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume 7 No. 2 Desember 2012.

Jessy Christine Mangowal. (2013). *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 Desember 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2003.

Koran Jakarta. (2014). *Volume Anggaran Belanja Modal Daerah Yang Meningkatkan*. [Online]. http://www.koranjakarta.com/241395/anggaran-belanja-modal-daerah-meningkat_ [11 Maret 2014].

Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: Infomatika.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta : Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Wali Kota Bandung No.20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 71 Tahun 2010.

Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Saragih, Jan Waner. (2003). *Analisis Pengaruh Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan.

Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business = Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Buku 2 Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods for Business = Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Buku 1 Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.

Stevanus J. Gomes dan Victor Pattiasina. (2011). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku*

Tenggara. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Ritu Nusa Ambon, Volume 13 Nomor 2, September 2011.

Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Taiwo dan Abayoni. (2011). *Government Expenditure and Economic Development*. Journal of Business and Management.

Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

www.disyanjakbdg.net

www.bps.jabarprov.go.id

www.dpkad.kotabandung.info